

**TELAAH TENTANG MASA PEMERINTAHAN  
PERDANA MENTERI JULIA GILLARD  
TAHUN 2010-2013**

**JURNAL**



Disusun oleh:  
Siti Musyarofah  
12406241007

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2016**

## ABSTRAK

Julia Gillard merupakan wanita pertama yang berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Mengawali karir politik sebagai perwakilan daerah Lalor, Victoria kemudian sampai pada posisi sebagai Deputy dan akhirnya menjadi Perdana Menteri Australia pada 2010 menggantikan Kevin Rudd. Naiknya Julia Gillard sebagai Perdana Menteri Australia menjadi hal yang kontroversi karena dengan sengaja mengkudeta atasannya sendiri sekaligus rekan satu partai. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui kondisi politik Australia sebelum Julia Gillard, (2) mengetahui sosok Julia Gillard dalam dunia politik, dan (3) mengetahui kebijakan politik Julia Gillard.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahapan yaitu: pertama pemilihan topik yang akan dikaji, kedua pengumpulan sumber (primer dan sekunder), ketiga kritik sumber untuk mengetahui keaslian sumber, keempat interpretasi untuk menafsirkan data dan fakta yang diperoleh, dan kelima penulisan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kevin Rudd merupakan Perdana Menteri Australia ke-26 sebelum Julia Gillard. Popularitas Rudd sempat tak tertandingi karena kebijakannya terhadap Suku Aborigin dan Protokol Kyoto, namun ketika memutuskan untuk menaikkan pajak pertambangan popularitasnya menurun drastis. Momen itu dimanfaatkan oleh Julia Gillard untuk menggantikan posisinya, berawal dari peristiwa ini kemudian kedua tokoh terlibat konflik internal Partai Buruh. (2) Julia Gillard lahir di Inggris 29 September 1961 dari ayahnya John Gillard dan ibunya Moira Gillard. Gillard kecil mengidap sakit peradangan dinding paru-paru sehingga pindah ke Australia dan menetap di Adelaide. Sebelum memutuskan untuk terjun ke dunia politik, Julia Gillard adalah seorang pengacara. (3) Setelah resmi dilantik menjadi Perdana Menteri Australia, Julia Gillard berkegas melaksanakan tugasnya, beberapa kebijakan selama kepemimpinannya adalah: penerapan pajak pertambangan yang besarnya pajak diubah menjadi 30 persen, pajak emisi karbon yang harus mengurangi emisi, pajak baru bagi yang tidak terkena banjir, kebijakan terhadap pencari suaka dengan menjadikan Timor Leste sebagai pusat pemrosesan regional, undang-undang kemasan polos, serta beberapa kebijakan terhadap Indonesia.

**Kata kunci:** Julia Gillard, Perdana Menteri Australia, tahun 2010-2013.

## ABSTRACT

*Julia Gillard is the first woman who successfully served as Australian Prime Minister. She started her political career as the representative of the region of Lalor, Victoria, and then she reached the position of Deputy and finally served as Australian Prime Minister in 2010 replacing Kevin Rudd. The rise of Julia Gillard as Australian Prime Minister became controversial because she deliberately made a coup against her own superior and her party fellow. This study aimed to investigate: (1) the political conditions in Australia before Julia Gillard, (2) Julia Gillard in the political arena, and (3) Julia Gillard's political policies.*

*This undergraduate thesis research employed the historical method according to Kuntowijoyo, consisting of five stages, i.e.: first, selection the topic to study; second, collecting (primary and secondary) sources; third, source criticism to investigate the source originality; fourth, interpretation of data and facts that were found; and fifth, writing.*

*The results of the study were as follows. (1) Kevin Rudd is the 26<sup>th</sup> Australian Prime Minister before Julia Gillard. Rudd's popularity was unmatched because of his policies on the Aboriginal tribe and Kyoto Protocol. But when he made a decision to raise the mining tax, his popularity fell down drastically. This moment was utilized by Julia Gillard to replace his position; from this, the two figures were involved in internal conflicts in the Labor Party. (2) Julia Gillard was born in England on 29 September 1961; her father was John Gillard and her mother was Moira Gillard. Young Gillard suffered from the lung wall inflammation so that she moved to Australia and stayed in Adelaide. Before she decided to enter the political world, Julia Gillard was a lawyer. (3) After she was formally inaugurated as Australian Prime Minister, Julia Gillard rushed to carry out her duties. Some policies under her leadership included: the implementation of the mining tax which was changed into 30%, the carbon emission tax in order to reduce emission, a new tax for those who were not flooded, new policies for asylum seekers by using Timor Leste as the regional processing center, plain packaging legislation, and some policies on Indonesia.*

**Keywords:** Julia Gillard, Australian Prime Minister, 2010-2013.

# TELAAH TENTANG MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI JULIA GILLARD TAHUN 2010-2013

Penulis 1 : Siti Musyarofah  
Penulis 2 : Terry Irenewaty, M.Hum  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Sitimusyarofah53@gmail.com

## I. Pendahuluan

Tahun 2010 merupakan salah satu tahun bersejarah bagi Australia. Hal itu di karenakan pada tahun 2010 untuk pertama kalinya Australia memiliki perdana menteri wanita yang berhasil mengalahkan dominasi laki-laki dalam sejarah pemilu Australia. Perdana Menteri wanita itu adalah Julia Gillard yang berhasil mengalahkan Kevin Rudd dalam pemilu internal Partai Buruh yang selanjutnya mengambil alih jabatannya sebagai pemimpin partai sekaligus Perdana Menteri Australia.

Gillard berhasil mengalahkan Rudd dengan memanfaatkan situasi dan kondisi rakyat Australia yang saat itu mulai tidak menyenangkan sosok Kevin Rudd. Ketidakpopuleran Rudd berawal dari kondisi keuangan Australia yang terpuruk akibat krisis keuangan global.<sup>1</sup> Perdana Menteri Kevin Rud dinilai tidak bisa menjaga kondisi keuangan negara, sehingga masyarakat Australia khawatir jika anggaran negara akan mengalami defisit dan berdampak pada kehidupan mereka.

Julia Gillard mengawali karir politiknya di Partai Buruh pada tahun 1998, menjadi anggota DPR untuk wilayah Lalor, Victoria.<sup>2</sup> Sejak tahun itulah ia aktif dalam dunia perpolitikan Australia sampai akhirnya tahun 2010 ia berani menantang Kevin Rudd dalam pemilu internal Partai Buruh dan maju sebagai Perdana Menteri Australia. Setelah resmi dilantik, Gillard mulai menerapkan berbagai kebijakan yang dirasa perlu untuk memajukan Australia.

Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara, sehingga sehebat apapun seorang pemimpin jika sudah tidak mendapat dukungan dari rakyat maka berakhirilah kekuasaannya. Hal tersebut juga terjadi pada pemegang kekuasaan tertinggi Australia yang masih berasal dari Partai Buruh, yaitu Julia Gillard. Pajak emisi karbon<sup>3</sup> yang diterapkan pada Juli 2012 ternyata mendapat respon negatif dari masyarakat Australia dan menyebabkan popularitasnya menurun karena dinilai merugikan masyarakat Australia.<sup>4</sup> Banyak kalangan mulai kecewa dengan kepemimpinannya dan merasa bahwa ia tidak bisa menyelesaikan masalah politik yang terjadi di Australia.

Kevin Rudd yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Australia mengundurkan diri dan maju menantang Gillard dalam pemilu internal partai. Perolehan suara yang didapat Rudd dan Gillard adalah 57 berbanding 45 suara<sup>5</sup>, sehingga dengan demikian maka kemenangan diperoleh Kevin Rudd. Kevin Rudd yang berhasil mengalahkan Julia Gillard akhirnya bisa kembali menduduki jabatan Perdana

---

<sup>1</sup> Kevin 747 Tetap Populer, *Kompas*, 25 November 2008.

<sup>2</sup> Julia Gillard Perempuan Serba Pertama, *Kompas*, 25 Juni 2010.

<sup>3</sup> Pajak emisi karbon merupakan pajak yang dikenakan kepada pelaku industri Australia karena telah menyumbangkan gas karbon ke langit Australia yang menjadi salah satu penyebab rusaknya lingkungan.

<sup>4</sup> Pajak Emisi Karbon Tak Populer, *Kompas*, 3 Juli 2012.

<sup>5</sup> Rudd Gulingkan PM Gillard Partai Buruh Pilih Ketua yang Pernah Digulingkan, *Kompas*, 27 Juni 2013.

Menteri Australia untuk kedua kalinya, dan setelah kekalahan yang diterima oleh Julia Gillard, ia mengundurkan diri dari dunia politik Australia untuk selamanya.

Perpindahan kekuasaan dari Kevin Rudd ke Julia Gillard ke Kevin Rudd kembali seakan-akan menggambarkan kondisi internal Partai Buruh yang sedang dilanda konflik. Dua petinggi partai yang seharusnya mendukung satu sama lain justru melakukan hal sebaliknya dengan memanfaatkan kelemahannya demi ambisi menjadi seorang perdana menteri. Kondisi tersebut tentu menjadi kondisi yang tidak menguntungkan bagi citra Partai Buruh di kalangan masyarakat Australia. Perubahan pemerintahan yang terkesan seperti proses “kudeta” dari satu pihak ke pihak yang sedang menjabat.

Kevin Rudd dan Julia Gillard merupakan dua pemimpin Australia yang berasal dari Partai Buruh. Partai yang selalu menjalin kerjasama yang baik dengan Asia. Kedua pemimpin tersebut merupakan dua sosok yang berbeda, sehingga ketika mereka memimpin kebijakan politiknya pun mengalami beberapa perbedaan. Keduanya terlibat persaingan yang ketat dalam memperebutkan posisi tertinggi partai.

## **A. Kajian Teori**

Kajian teori merupakan kajian terhadap teori yang mendukung analisis dalam penelitian.<sup>6</sup> Kajian teori dapat menjadi peta konsep penulisan suatu karya ilmiah sehingga menjadi landasan yang kuat dalam penulisan. Konflik yang terjadi antara kedua tokoh Partai Buruh tersebut akan dibahas menggunakan Teori Konflik<sup>7</sup> karya Ralf Dahrendorf untuk meneliti persaingan bahkan konflik antara dua tokoh dari Partai Buruh yaitu Kevin Rudd dan Julia Gillard. Persaingan keduanya terlihat jelas ketika tahun 2010 Julia Gillard menantang Kevin Rudd dalam pemilu internal partai, setelah ia memanfaatkan ketidakpopuleran Kevin Rudd akibat beberapa kebijakan yang diterapkannya.

Dahrendorf menyatakan bahwa ketika kelompok konflik muncul maka akan terlibat dengan tindakan-tindakan yang membawa perubahan dalam struktur sosial.<sup>8</sup> Hal itu juga terjadi pada dua petinggi Partai Buruh yaitu Kevin Rudd dan Julia Gillard yang saling berseteru memperebutkan posisi puncak baik sebagai pemimpin partai atau pun sebagai Perdana Menteri Australia. Keduanya membawa perubahan yang cukup kentara ketika masing-masing di antara mereka menjabat sebagai Perdana Menteri.

Konflik yang terjadi di antara kedua tokoh pemimpin Partai Buruh tersebut sebenarnya tidak lepas dari ambisi masing-masing pribadi untuk menjadi sosok yang paling dihormati di Australia. Selain itu juga karena kebijakan-kebijakan yang membuat masing-masing tokoh tidak populer lagi di kalangan rakyat Australia. Hal tersebut membuat Partai Buruh segera mengambil tindakan agar rakyat tidak berpaling ke partai lain, demi mengamankan eksistensi Partai Buruh di parlemen Australia.

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Pemilihan Topik**

Pemilihan topik di dasarkan atas dua faktor yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>9</sup> Kedekatan emosional dalam penelitian ini adalah peneliti yang juga seorang perempuan

---

<sup>6</sup> Jurusan Pendidikan Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*, (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), hlm 3.

<sup>7</sup> George Ritzer & Douglas J. Goodman, “Sociological Theory”, a.b Nurhadi, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 281.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 285.

<sup>9</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah Cetakan Kelima*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 91.

tertarik untuk meneliti Julia Gillard sebagai perempuan pertama yang berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Perempuan yang biasanya dianggap sebagai makhluk lemah nyatanya bisa menjadi pemimpin negara yang biasanya ditempati oleh laki-laki.

Kedekatan intelektual dalam pemilihan topik penelitian ini adalah belum banyak yang mengkaji tentang perselisihan yang terjadi di dalam Partai Buruh Australia. Penelitian yang biasa dilakukan hanyalah mengkaji tentang hubungan Australia dengan Indonesia, tidak pernah menyinggung perselisihan yang ada di dalam Partai Buruh Australia. Selain itu juga belum ada yang membahas tentang kebijakan Julia Gillard selama menjabat sebagai Perdana Menteri Australia. Ketersediaan sumber juga menjadi salah satu alasan penulis melakukan penelitian.

## 2. Heuristik

Pengumpulan sumber atau biasa disebut heuristik adalah kegiatan mengumpulkan data atau bahan sesuai sejarah yang akan ditulis.<sup>10</sup> Berdasarkan urutan penyampaiannya, sumber dibagi ke dalam sumber primer dan sekunder.<sup>11</sup> Sumber primer adalah keterangan atau kesaksian yang diungkapkan oleh saksi mata dari suatu peristiwa bisa dalam bentuk tulisan, foto, dokumen, dsb. Sejauh ini penulis belum menemukan sumber primer yang relevan dengan topik yang dikaji. Sumber sekunder adalah keterangan atau kesaksian yang diungkapkan oleh orang yang tidak melihat atau mengetahui langsung suatu peristiwa<sup>12</sup>, biasanya orang tersebut mendapat cerita dari orang pertama atau dari membaca dokumen ataupun kemungkinan lainnya.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Daniel Murdiyarso. (2007). *Protokol Kyoto Implikasinya Bagi Negara Berkembang*. Jakarta: Kompas, George Thomas Kurian. (1990). *Facts On File National Profile: Australia and New Zealand*. United States of America: \_\_\_\_, Richard Chauvel, dkk. (2005). *Indonesia-Australia: Tantangan dan Kesempatan dalam Hubungan Politik Bilateral*, ed: Chusnul Mar'iyah. Jakarta: Granit, Sri Yulianti. (2012). "Politik Australia dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada Pemerintahan Julia Gillard (2010-2013)". *JOM FISIP*. Vol.1 No. 2. Hlm. 1-11, Arsip siaran pers kemendag. (2014). "Karena Kemasan Polos Rokok, Lima Negara WTO-kan Australia".

## 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan kritik terhadap sumber yang telah kita dapatkan. Kritik sumber dilakukan untuk mengetahui kebenaran dan keaslian sumber yang didapat. Kritik sumber umumnya dilakukan terhadap sumber-sumber pertama, kritik tersebut menyangkut verifikasi sumber yaitu pengujian mengenai kebenaran atau ketepatan (akurasi) dari sumber itu.<sup>13</sup> Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik ekstern (keaslian) dan kritik intern (kredibilitas isi).<sup>14</sup> Kritik ekstern merupakan kritik terhadap keaslian sumber (fisik) misalnya jenis kertas yang digunakan, ukuran, bahan, jenis tulisan, dsb, sedangkan kritik intern merupakan kritik terhadap isi dari suatu sumber yang didapat.<sup>15</sup>

## 4. Interpretasi

Setelah melakukan verifikasi maka akan diperoleh berbagai informasi tentang tema yang akan dikaji, informasi yang diperoleh akan memasuki tahap interpretasi.<sup>16</sup> Interpretasi merupakan penafsiran

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>13</sup> Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 132.

<sup>14</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 100.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

terhadap data yang telah didapat.<sup>17</sup> Penulis menilai bahwa dalam Partai Buruh terjadi konflik antara Gillard dan Rudd, pemerintahan Perdana Menteri Gillard banyak menuai kontroversi karena dengan sengaja melakukan kudeta terhadap Kevin Rudd. Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, Gillard berhasil menerapkan berbagai kebijakan.

## 5. Penulisan

Penulisan sejarah dilakukan sebagai upaya untuk mendokumentasikan sesuatu agar tidak hilang begitu saja, dalam penulisan sejarah harus memperhatikan sisi waktunya agar kronologis.<sup>18</sup> Penulisan sejarah yang kronologis akan memudahkan pembaca dalam memahami peristiwa sejarah yang dituliskan. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masa pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard tahun 2010-2013.

## II. Pembahasan

### A. Kondisi Politik Australia Sebelum Julia Gillard

#### 1. Sekilas Masa Pemerintahan Kevin Rudd

Kevin Michael Rudd atau yang lebih sering dipanggil Kevin Rudd lahir di Nambour, Queensland pada 21 September 1957.<sup>19</sup> Rudd merupakan Perdana Menteri Australia yang menjabat pada tahun 2007-2010 sebelum Julia Gillard. Beberapa kebijakan Rudd selama menjadi Perdana Menteri Australia yaitu meminta maaf kepada Suku Aborigin, meratifikasi Protokol Kyoto, dan menarik pasukan Australia dari Irak.

Suku Aborigin merupakan suku asli Australia yang keberadaannya kurang diakui oleh pemerintah yang didominasi oleh orang kulit putih. Banyak perlakuan diskriminatif yang diterima oleh suku Aborigin, bahkan mereka kehilangan budaya aslinya sendiri. Atas dasar kejadian yang dialami oleh suku Aborigin maka Kevin Rudd atas nama pemerintah Australia meminta maaf kepada mereka dan dilaksanakan pada 13 Februari 2008 di Parlemen Australia.<sup>20</sup> Kejadian bersejarah itu disaksikan oleh ribuan warga Aborigin yang hadir langsung ke parlemen maupun yang melihat di layar televisi.

Kebijakan kedua adalah meratifikasi Protokol Kyoto yang dilakukan oleh Rudd setelah pada pemerintahan sebelumnya Australia enggan meratifikasi karena mengikuti langkah AS. Protokol Kyoto disusun untuk mengatur target kuantitatif penurunan emisi dan target waktu penurunan emisi bagi negara maju.<sup>21</sup> Bergabungnya Australia dalam Protokol Kyoto merupakan salah satu langkah maju dan penting yang diambil oleh Perdana Menteri Rudd demi menjaga iklim dunia. Langkah nyata yang diambil oleh pemerintahan Rudd adalah dengan komitmen Australia mengurangi emisi antara 5 sampai 15 persen dari level tahun 2000 pada tahun 2020.<sup>22</sup>

---

<sup>16</sup> Sardiman A.M, *op.cit.*, 105.

<sup>17</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 101.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>19</sup> Tersaji dalam arsip National Archives of Australia <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/rudd/fast-facts.aspx> diakses pada 17 Februari 2016 pukul 13.45 WIB.

<sup>20</sup> Rudd Resmi Minta Maaf Kepada Aborigin, *Kedaulatan Rakyat*, 14 Februari 2008.

<sup>21</sup> Daniel Murdiyaso, *Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang*, (Jakarta: Kompas, 2007), hlm 4.

<sup>22</sup> Perubahan Iklim: Masalah Emisi yang Multidimensi, *Kompas*, 6 Maret 2009.

Kebijakan ketiga yang diambil Kevin Rudd adalah dengan menarik pasukan Australia dari Irak. Pasukan Australia dikirim ke Irak tahun 2003 oleh Perdana Menteri John Howard sebagai dukungan kepada AS. AS mengklaim bahwa Irak mempunyai senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya sehingga harus ditemukan. Akan tetapi tuduhan itu tidak ada buktinya, dan mengundang kecaman dari dunia internasional, termasuk rakyat Australia yang tidak setuju dengan langkah Howard. Pada masa pemerintahan Kevin Rudd, pasukan Australia mulai ditarik dan mulai direalisasikan pada Juni 2008 dengan menarik sedikitnya 550 tentara dari Propinsi Dhi Qar dan Muthanna.<sup>23</sup>

## 2. Kondisi Internal Partai Buruh

Partai Buruh Australia (*Australian Labor Party*) berdiri tahun 1891.<sup>24</sup> Partai tersebut berawal dari aksi pemogokan massal yang gagal dalam memperjuangkan hak dan kewajibannya sebagai para pekerja. Sadar akan pengalamannya tersebut maka serikat pekerja harus memiliki wakil-wakil politik di parlemen untuk memperjuangkan kepentingan mereka.<sup>25</sup> Berawal dari peristiwa itulah kemudian Partai Buruh berkembang dan menjadi salah satu partai yang mendominasi Parlemen Australia.

Kevin Rudd merupakan salah satu tokoh Partai Buruh yang berhasil menjabat sebagai Perdana Menteri Australia setelah berhasil mematahkan dominasi John Howard dari Partai Liberal di Parlemen Australia pada tahun 2007. Pada awal kemunculannya, ia dianggap sebagai tokoh pembawa arah baru bagi politik Australia, akan tetapi ketika Rudd menerapkan beberapa kebijakannya yang dianggap tidak relevan bagi masyarakat Australia, maka Kevin Rudd mulai tidak disenangi rakyat.

Popularitas Kevin Rudd yang terus menurun akhirnya dimanfaatkan oleh rekan satu partainya dan sekaligus Deputinya sendiri, Julia Gillard. Gillard menantang Rudd dalam voting internal partai yang dilaksanakan pada Kamis 24 Juni 2010.<sup>26</sup> Kejadian tersebut tentu mengejutkan banyak pihak lantaran Gillard merupakan salah satu tangan kanan Rudd dalam parlemen yang sedang dijalankannya. Gillard juga menjadi bagian dari empat anggota "*kitchen cabinet*" dalam pemerintahan Rudd.<sup>27</sup> Tergusurnya Rudd yang dianggap sebagai perdana menteri paling populer sepanjang sejarah Australia modern, menunjukkan partainya kehilangan kepercayaan bahwa dia bisa memenangi periode kedua pemilu nasional.

Naiknya Julia Gillard menjadi Perdana Menteri Australia menuai banyak kontroversi, hal tersebut dikarenakan Gillard secara sengaja melakukan "kudeta" terhadap atasan sekaligus rekan satu partainya, Kevin Rudd. Perang dingin diantara keduanya menjadi hal yang tidak bisa dihindari walaupun hal itu sering dibantah masing-masing pihak. Terlebih lagi Kevin Rudd yang dulunya menjadi Perdana Menteri Australia sekarang dalam pemerintahan Gillard dijadikan sebagai Menteri Luar Negeri Australia. Akan tetapi jabatan sebagai menteri luar negeri hanya bertahan sampai 2012, karena Rudd mengundurkan diri dan menantang Gillard dalam pemilu partai.

Kevin Rudd yang berhasil mengalahkan Julia Gillard dan menjadi Perdana Menteri Australia membawa harapan baru bagi Partai Buruh di pemilu nasional selanjutnya. Akan tetapi fenomena yang terjadi di dalam Partai Buruh, antara Rudd dan Gillard merupakan sesuatu yang cukup menggelikan. Pasalnya mereka adalah sosok yang mengetahui keadaan negara dan masyarakat Australia, namun

---

<sup>23</sup> Australia Mulai Tarik Ratusan Tentara, *Kompas*, 2 Juni 2008.

<sup>24</sup> Julius Siboro, *Sejarah Australia*, (Jakarta: IKIP Bandung, 1989), hlm. 149.

<sup>25</sup> Richard Chauvel, " \_\_\_\_\_ ", a.b Sujinah dan Ismu, *Budaya dan Politik Australia*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), hlm. 17.

<sup>26</sup> Kevin Rudd Ditantang Deputinya, *Kompas*, 24 Juni 2010.

<sup>27</sup> Julia Gillard dan Kekejaman Politik, *Kompas*, 25 Juni 2010.

karena sifat ambisius yang dimiliki keduanya membuat mereka seolah tidak peduli dengan negara dan hanya memikirkan *prestise* dari jabatan sebagai Perdana Menteri Australia.

## B. Sosok Julia Gillard dalam Dunia Politik

### 1. Latar Belakang Keluarga

Julia Gillard merupakan pemimpin yang lahir di luar negara yang dipimpinya, nama lengkapnya adalah Julia Eileen Gillard yang lahir di Barry, Wales, Inggris pada 29 September 1961.<sup>28</sup> Ayah dan Ibu Gillard, John Gillard dan Moira Gillard, mereka membawanya pindah ke Australia karena saat berumur empat tahun Gillard kecil terkena *bronchopneumonia* (peradangan di dinding paru-paru).<sup>29</sup> Ayahnya bekerja sebagai perawat psikiater sedangkan ibunya bekerja di lembaga Bala Keselamatan.<sup>30</sup>

Sebelum menjadi Perdana Menteri Australia, cita-cita Gillard adalah menjadi seorang guru.<sup>31</sup> Menjadi seorang guru merupakan pekerjaan yang menyenangkan karena melihat semangat para pemuda. Cita-cita yang mulia sebenarnya, namun karena kemampuan Gillard lebih menonjol dalam bidang politik dan popularitasnya juga terus naik maka cita-cita mulia tersebut harus terpendam.

Terlahir dari keluarga Nasrani, Perdana Menteri Gillard merupakan seorang yang dibaptis, namun ketika sudah dewasa Perdana Menteri Gillard memilih untuk tidak religius atau dengan kata lain lebih memilih menjadi seorang yang atheis (tidak percaya adanya Tuhan). Hal tersebut terlihat ketika pengambilan sumpah yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal. Perdana Menteri Gillard lebih memilih membuat penegasan dari pada mengambil sumpah berdasarkan Alkitab.<sup>32</sup> Tidak hanya masalah agama, Perdana Menteri Gillard pun memilih tidak menikah, tidak mempunyai anak, namun mempunyai teman hidup bernama Mathieson.<sup>33</sup> Pilihan yang cukup ekstrem bagi seorang pemimpin negara yang menjadi panutan bagi masyarakatnya.

Tim Mathieson merupakan orang pertama yang menjadi pasangan Perdana Menteri yang hubungannya tidak diresmikan dalam bentuk pernikahan. Pada awal kepemimpinan Perdana Menteri Gillard masalah hubungannya dengan Tim Mathieson tidak terlalu dipermasalahkan oleh masyarakat Australia, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, hubungan keduanya kerap menjadi perbincangan dan dinilai tidak layak mengingat Gillard merupakan seorang pemimpin negara.

---

<sup>28</sup> Tersaji dalam arsip National Archives of Australia <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/gillard/fast-facts.aspx> diakses pada 17 Februari 2016 pukul 13.40 WIB

<sup>29</sup> Julia Gillard Perempuan Serba Pertama, *Kompas*, 25 Juni 2010.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ita, 2010, *Jadi PM Wanita Pertama Australia, Julia Gillard Dulunya Ingin Jadi Guru*, <http://news.detik.com/berita/1385417/jadi-pm-wanita-pertama-australia-julia-gillard-dulunya-ingin-jadi-guru> diakses pada 19 Maret 2016 pukul 15.15 wib.

<sup>32</sup> Mjeducation, 2010, *Julia Gillard, Kisah Sukses Seorang Imigran*, <http://mje.co.id/julia-gillard-kisah-sukses-seorang-migran/> diakses pada 19 Maret 2016 pukul 14.00 wib.

<sup>33</sup> Tersaji dalam arsip National Archives of Australia <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/Gillard/spouse.aspx> diakses pada 17 Februari 2016 pukul 13.48 WIB.

## 2. Latar Belakang Pendidikan

Julia Gillard mengawali pendidikannya di Mitcham Primary School kemudian melanjutkan ke Unley High School.<sup>34</sup> Di masa kecil, orang tuanya hanya mampu mendidik Julia dan kakaknya, Alison, di sekolah umum negeri.<sup>35</sup> Meskipun hanya bersekolah di sekolah umum namun Gillard menjadi siswa yang cerdas, berani dan kritis dalam berbagai hal.

Gillard lulus dari Unley High School pada 1978<sup>36</sup> dan menjadi siswa yang kritis. Setelah lulus dari SMA Unley Gillard mendaftarkan ke Universitas Adelaide. Gillard mengambil jurusan seni dan hukum sebagai bidang keahliannya. Setelah beberapa tahun kuliah Gillard terpilih menjadi Presiden Mahasiswa Australia (Australian Union of Students), kemudian Gillard memutuskan untuk pindah ke Universitas Melbourne.

Setelah lulus dari Universitas, Gillard bekerja di firma hukum Slater & Gordon sebagai pengacara dengan spesialisasi bidang hukum industrial.<sup>37</sup> Gillard dari awal memang sudah tertarik dengan dunia buruh, dan semasa kuliah juga bergabung dalam Kelompok Buruh maka dalam hal pekerjaan sebagai pengacara, Gillard mendapat bagian yang fokus pada dunia kaum buruh. Berbagai prestasi telah didapat oleh Gillard sebagai seorang pengacara muda, sampai akhirnya dia memutuskan lebih memilih terjun ke dalam dunia politik untuk memperjuangkan hak-hak kaum buruh.

## 3. Karir Politik

Perdana Menteri Julia Gillard mengawali karir politiknya ketika masih berstatus mahasiswa seni dan hukum Universitas Adelaide. Menjadi mahasiswa seni dan hukum tentu memudahkan Gillard dalam mengkaji berbagai aturan yang diterapkan pemerintah, terutama hal-hal yang berkaitan dengan kaum buruh. Julia Gillard pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Australia, dan memutuskan untuk pindah ke Universitas Melbourne.

Berbekal kemampuan pimpinannya dan berbagai pengalaman yang diperoleh ketika masih di Universitas. Julia Gillard memberanikan diri mencalonkan diri untuk wilayah Lalor, Victoria pada 1998. Ketika itu parlemen masih dikuasai Perdana Menteri John Howard dari Partai Liberal, karena Gillard berasal dari Partai Buruh maka posisinya dalam pemerintah adalah sebagai pihak oposisi. Karir politiknya semakin meningkat sampai akhirnya menjabat sebagai Deputy Kevin Rudd tahun 2007-2010.

Ketika popularitas Perdana Menteri Rudd menurun akibat pajak pertambangan yang diterapkannya dan masyarakat Australia sudah mulai meninggalkan dirinya, Gillard kemudian maju menjadi pemimpin Partai Buruh (ALP). Pada awal kepemimpinannya, Perdana Menteri Gillard masih meneruskan beberapa kebijakan pendahulunya. Salah satunya adalah pajak pertambangan yang telah melengserkan Perdana Menteri Rudd dari jabatannya. Namun, pajak pertambangan pada era Perdana Menteri Gillard dimodifikasi kembali agar sesuai dengan harapan pelaku pertambangan.

Sebagai Perdana Menteri perempuan pertama, Gillard berusaha melakukan berbagai inovasi dalam pemerintahannya. Akan tetapi berbagai kebijakan yang dibuat justru menuai kontroversi seperti Undang-Undang Kemasan Polos dan Pajak Emisi yang tidak populer di kalangan rakyat Australia. Dua

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Ita Lismawati F. Malau, 2010, *Si Pekerja Keras dari Negeri Kangguru*, <http://m.news.viva.co.id/news/read/159966-si-pekerja-keras-dari-negeri-kangguru/0> diakses pada 19 Maret 2016 pukul 15.08 wib.

<sup>36</sup> Julia Gillard merupakan alumnus SMA Unley, dan pada Desember 2006 berkesempatan mengunjungi sekolah tersebut, tersaji dalam \_\_, 2006, <http://www.abc.net.au/news/2006-12-14/gillard-addresses-students-at-former-high-school/2153776>, diakses pada 4 April 2016 pukul 20.12 wib.

<sup>37</sup> Julia Gillard, Perempuan Serba Pertama, *Kompas*, 25 Juni 2010.

kebijakan itu membuat pamor Gillard turun, ditambah dengan pilihan hidupnya yang dianggap tidak pas menjadi sesuatu yang dibicarakan oleh masyarakat Australia.

Memanfaatkan keadaan Gillard yang tidak didukung rakyat, membuat Rudd pun menantang mantan Deputinya tersebut dalam pemilu internal partai. Pemilu tersebut dimenangkan Rudd dan sekaligus membawa dirinya menjadi Perdana Menteri Australia kembali. Gillard yang kalah dalam percaturan politik internal partai mengundurkan diri dari dunia politik untuk selamanya. Hal tersebut sesuai janji yang dibuat bersama Perdana Menteri Rudd sebelum pemilu internal partai dilaksanakan.

### **C. Kebijakan Perdana Menteri Julia Gillard**

#### **1. Kebijakan dalam Negeri**

##### **a. Pajak Pertambangan**

Kenaikan pajak yang signifikan pada sektor pertambangan mulai diterapkan pada masa Perdana Menteri Rudd. Pajak yang dikenakan bagi pelaku pertambangan adalah sebesar 40 persen.<sup>38</sup> Nilai pajak yang sangat besar untuk mengurangi keuntungan mereka. Sehingga kebijakan tersebut mendapat respon negatif dari pelaku pertambangan. Berbeda dengan Perdana Menteri terdahulu, pada penerapan pajak pertambangan kali ini Gillard menerapkan pajak sebesar 30 persen. Angka tersebut dinilai aman karena akan dibicarakan dengan kalangan pertambangan.

Ketegangan antara pemerintah dengan pihak pertambangan harus segera diselesaikan mengingat keuntungan yang dihasilkan dari sektor tambang. Perlu adanya negosiasi antara pemerintah dan pihak pertambangan untuk menemukan jalan terbaik bagi kedua belah pihak. Untuk mencapai konsensus pemerintah perlu berbuat lebih besar dari sekedar konsultasi. Pemerintah dan pelaku tambang perlu negosiasi. Kedua belah pihak harus segera mengakhiri ketidakpastian yang tidak bagus bagi bangsa Australia.<sup>39</sup> Kesepakatan yang akan dibuat antara pelaku pertambangan dengan pemerintah akan membawa satu titik terang bagi keberlangsungan pajak tersebut. Karena bagaimana pun juga jika tidak terjadi kesepakatan, bukan tidak mungkin nasib Perdana Menteri Gillard akan sama dengan pendahulunya.

Setelah melakukan negosiasi final dengan pihak pertambangan seperti BHP Billiton, Rio Tinto, dan Xstrata serta memutuskan bahwa besaran pajak tetap 30 persen.<sup>40</sup> Pajak pertambangan akhirnya disahkan pada 19 Maret 2012 dan mulai berlaku per 1 Juli 2012. Masyarakat juga mendapatkan bagiannya melalui pajak yang dibayarkan oleh pihak pertambangan, dan akan dinikmati melalui berbagai fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.

##### **b. Pajak Emisi Karbon**

Pajak emisi karbon dihidupkan kembali ketika Perdana Menteri Gillard menjabat, sebagai salah satu keberlanjutan dari ratifikasi Protokol Kyoto yang pernah dilakukan Australia. Sebelum disahkan pada November 2011, terlebih dahulu terjadi aksi yang mendesak pemerintah Australia untuk segera mengurangi emisi karbon. Sebagai salah satu negara penyumbang emisi terbesar di dunia yang menyebabkan pemanasan global, warga Australia menggelar aksi dukungan kebijakan pajak emisi. Aksi tersebut terjadi setelah adanya laporan terbaru risiko perubahan cuaca terhadap peningkatan tinggi permukaan air laut setinggi 1,1 meter hingga tahun 2100.<sup>41</sup>

Pajak emisi karbon yang disahkan pada November 2011 tersebut mulai diterapkan pada Juli 2012. Muncul berbagai respon masyarakat terkait penerapan pajak tersebut. Jika dilihat dari sudut

---

<sup>38</sup> Pemilih Australia Menilai Perdana Menteri Tidak Kompeten, *Kompas*, 8 Juni 2010.

<sup>39</sup> PM: Akhiri Kontroversi, Julia Gillard Gantikan Kevin Rudd, *Kompas*, 25 Juni 2010.

<sup>40</sup> PM Gillard dilantik, Kursinya Siap Tertendang, *Kompas*, 16 September 2010.

<sup>41</sup> Warga Australia Desak Pemerintah Kurangi Emisi, *Kompas*, 6 Juni 2011.

pandang warga biasa maka mereka sangat mendukung adanya kebijakan emisi karbon, akan tetapi dari pelaku bisnis industri sangat menentang kebijakan tersebut. Sekitar 2.000 pengunjung rasa turun ke jalan-jalan kota Sidney untuk menuntut pembatalan penerapan pajak.<sup>42</sup> Penolakan terjadi dikarenakan besarnya pajak yang terlalu mahal bagi pelaku industri Australia, bahkan lebih besar dari Eropa yang hanya Rp. 96.500 per ton gas.

Hingga akhir pemerintahan Perdana Menteri Gillard pajak emisi karbon tetap tidak populer meskipun mendapat dukungan dari beberapa pihak, terutama aktifis lingkungan. Akan tetapi penolakan terjadi, sebanyak 62 persen dari 1400 responden jajak pendapat menentang pemberlakuan pajak tersebut.<sup>43</sup> Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Australia tidak mendukung pemberlakuan pajak emisi karbon meskipun mereka sadar efek yang ditimbulkan dari sektor industri.

### c. Pajak Baru

Kondisi iklim bumi yang semakin ekstrem akibat perbuatan manusia sedikit demi sedikit mulai terlihat akibatnya. Australia yang sering mendapat julukan benua terkering dan terpanas di bumi seolah tertutup menjadi genangan air akibat banjir di beberapa negara bagian. Setelah Queensland yang diterjang banjir bandang kemudian banjir meluas ke daerah Victoria, dan sedikitnya merendam 46 kota.<sup>44</sup>

Ribuan warga berusaha menyelamatkan apapun dari harta benda mereka dari banjir terparah dalam 200 tahun terakhir. Tidak hanya Melbourne dan beberapa kota negara bagian Victoria yang rusak akibat banjir. Brisbane juga merupakan salah satu kota yang cukup parah saat terjadi musibah tersebut.

Melihat kondisi yang sangat parah dan membutuhkan biaya tinggi untuk membangun kembali kota-kota atau negara bagian. Maka pemerintah bermaksud untuk menerapkan pajak baru yaitu pajak bagi yang tidak terkena banjir untuk mengeluarkan pajak yang agak tinggi. Pemerintah berharap agar masyarakat mau bekerjasama untuk membangun wilayahnya kembali. Besaran pajak yang diterapkan adalah 0,5 persen untuk pendapatan antara 50.000 dollar AS dan 100.000 dollar AS, serta 1 persen untuk pendapatan di atas itu, diharapkan akan mengumpulkan 1,8 miliar dollar AS.<sup>45</sup>

Kerusakan akibat bencana banjir menyebabkan kerugian yang sangat besar. Agar pemerintah Australia terhindar dari pinjaman luar negeri yang terlampau besar, maka pemerintah mengusulkan pajak baru. Pajak bagi yang tidak terkena banjir, karena alokasi bantuan dari pemerintah pusat adalah sebesar 75 persen untuk membangun infrastruktur penting. Selanjutnya pemerintah negara bagian bertanggungjawab atas 25 persen biaya untuk membangun wilayahnya.<sup>46</sup>

## 2. Kebijakan Luar Negeri

### a. Kebijakan terhadap Pencari suaka

Perdebatan soal pencari suaka sudah lama terjadi di masyarakat Australia, bahkan perdana menteri terdahulu pernah dinilai tidak tegas saat menghadapi para pencari suaka yang terus

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Banjir Australia, Bencana Terparah, Kini Sebanyak 46 Kota di Victoria Terendam, *Kompas*, 18 Januari 2011.

<sup>45</sup> Australia Usulkan Pajak Baru, Warga Yang Tak Terkena Banjir Dikenai Pajak Pemulihan, *Kompas*, 28 Januari 2011.

<sup>46</sup> *Ibid.*

berdatangan ke Australia. Seiring bertambahnya para pencari suaka yang masuk ke Australia, maka Perdana Menteri Gillard mengambil kebijakan untuk menjadikan Timor Leste sebagai pusat pemrosesan regional.<sup>47</sup> Tujuan kebijakan tersebut agar para pencari suaka yang masuk ke Australia murni untuk mencari perlindungan, bukan untuk dijual sebagai salah satu dari sindikat “*human trafficking*”<sup>48</sup> yang sedang marak terjadi.

Pusat pemrosesan regional tersebut digunakan untuk menyelediki asal usul dan tujuan kedatangan mereka ke Australia. Apabila mereka datang dengan prosedur yang sesuai maka mereka juga akan diperlakukan dengan adil dan sesuai di Australia, namun jika mereka terbukti sebagai imigran gelap maka akan dipulangkan ke negara asalnya. Pemerintah Australia meyakini bahwa negaranya akan memperlakukan pencari suaka dengan baik asalkan prosedur yang mereka pakai sah dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Rencana Perdana Menteri Gillard menjadikan Timor Leste sebagai pusat pemrosesan pencari suaka sepertinya memerlukan usaha yang ekstra. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak di Timor Leste yang menolak rencana Perdana Menteri Gillard. Sebagai negara yang lebih besar dari Timor Leste, Australia seharusnya bisa menampung para pencari suaka tanpa melibatkan negara lain. Mereka tidak ingin Timor Leste dijadikan koloni oleh Australia dengan menitipkan para calon pencari suaka di negaranya.

Melimpahkan pokok permasalahan suaka ke negara lain, mungkin itulah yang menjadi alasan penolakan sebagian besar menteri dalam kabinet Perdana Menteri Gusmao. Mereka sadar bahwa jika Timor Leste setuju dengan usulan Perdana Menteri Gillard untuk dijadikan sebagai pusat pemrosesan pencari suaka, maka hanya akan memunculkan masalah baru bagi kedua negara. Timor Leste yang pada dasarnya merupakan negara berkembang sadar bahwa permasalahan di dalam negeri masih banyak yang harus diselesaikan ketimbang harus mengurus usulan Perdana Menteri Gillard.

#### b. Undang-Undang Kemasan Polos

Jumlah perokok di Australia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Para pecandu rokok tidak hanya dari kalangan orang tua saja namun juga dari para remaja yang sudah gemar mengisap rokok. Dalam banyak penelitian, rokok juga menjadi penyebab utama kematian manusia. Tidak hanya berdampak pada perokok aktif saja, namun berdampak juga pada perokok pasif.

Oleh karenanya sejak Perdana Menteri Gillard menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, dia sangat memperhatikan masalah kesehatan. Kehawatiran pemerintah akan efek dari rokok bagi generasi penerus menjadi salah satu alasan diterapkannya undang-undang kemasan polos pada rokok. Kebijakan kemasan polos rokok tersebut dimulai dengan keikutsertaan Australia dalam meratifikasi *The WHO Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) pada 27 November 2004.<sup>49</sup> Sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama berarti Australia harus mengikuti peraturan yang ada di dalam perjanjian tersebut. Hal itulah yang menjadi landasan hukum pemerintah Australia menerapkan kebijakan kemasan polos rokok.

Australia merupakan negara pertama yang memperkenalkan hukum kemasan polos pada rokok. Kebijakan tersebut disahkan pada November 2011 untuk mengatur peredaran rokok yang dikemas

---

<sup>47</sup> Timor Leste Jadi Pusat Suaka, PM Australia Bantah Hidupkan Lagi Solusi Pasifik, *Kompas*, 7 Juli 2010.

<sup>48</sup> *human trafficking* berarti perdagangan manusia untuk dijadikan sebagai budak atau hal semacamnya yang sifatnya kurang berperikemanusiaan.

<sup>49</sup> Sri Yuliati, (2012), “Politik Australia dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada Pemerintahan Julia Gillard (2010-2013)”, *JOM FISIP*, Volume 1, No. 2, hlm. 1.

dalam paket generic berwarna hijau gelap.<sup>50</sup> Tujuan diberlakukannya kebijakan ini adalah agar rokok tidak dijual secara terang-terangan seperti yang terjadi sebelumnya.

Kebijakan kemasan polos mendapat respon positif dan negatif dari berbagai kalangan. Ada negara-negara yang berniat mengikuti jejak Australia dalam membatasi penyebaran tembakau, ada juga yang menentang keras kebijakan tersebut. Terutama dari negara-negara pengekspor rokok seperti Indonesia dan beberapa negara lain. Australia dianggap melanggar WTO (*World Trade Organisation*) tentang hak kekayaan intelektual atas merk dagang internasional. Perdana Menteri Gillard juga mendapat banyak intimidasi dari beberapa perusahaan rokok besar di Australia yang sangat menentangnya. Meskipun banyak ditentang oleh berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri Perdana Menteri Gillard tetap melanjutkan kebijakannya tersebut demi kesehatan generasi muda Australia.

### c. Kebijakan terhadap Indonesia

Pendidikan merupakan salah satu aset penting dalam kehidupan manusia. Sebagai dua negara yang mempunyai hubungan bilateral, Australia sepakat memberikan bantuan pendidikan terhadap Indonesia. Bantuan pendidikan yang diberikan bertujuan untuk mendukung Indonesia menyediakan program wajib belajar 9 tahun<sup>51</sup> terutama di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan. Selain bantuan dana untuk membangun sekolah di wilayah terpencil, Australia juga memberikan dukungan lain terhadap dunia pendidikan Indonesia. Hal itu diwujudkan dengan memberikan beasiswa kepada ilmuwan Indonesia melalui programnya *The Prime Minister's Australia Asia Awards*<sup>52</sup> yang diberikan langsung oleh Perdana Menteri Julia Gillard pada bulan November 2010.

Selain itu agar generasi penerus bangsa saling mengetahui budaya dan masyarakat masing-masing negara maka diadakan pertukaran pelajar dan meningkatkan jumlah siswa yang belajar di masing-masing negara.<sup>53</sup> Dengan adanya kerja sama di bidang pendidikan ini diharapkan dapat membentuk generasi penerus yang lebih baik serta dapat bersaing di kancah internasional. Selain itu juga sebagai wujud dari hubungan baik yang dijalin antara Australia dengan Indonesia.

Selain menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Gillard, Australia dan Indonesia menjalin kerja sama dalam bidang pertahanan yaitu dengan menyelenggarakan simulasi aksi gabungan untuk mengatasi aksi terorisme. Maraknya aksi terorisme yang melanda dunia internasional membuat pemerintah Australia bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam simulasi operasi penanggulangan terorisme<sup>54</sup> yang diselenggarakan di Bali. Pada simulasi tersebut pasukan khusus Australia (*Socom*) bekerja sama dengan *Kopassus* untuk menyelamatkan para sandera yang ditahan oleh pelaku terror di Bandar udara Ngurah Rai Bali.<sup>55</sup> Diadakannya simulasi tersebut diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kedua pasukan

---

<sup>50</sup> Tersaji dalam arsip National Archives of Australia, <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/Gillard/in-office.aspx>, diakses pada 17 Februari 2016.

<sup>51</sup> Pernyataan Bersama Indonesia-Australia dalam arsip <http://indonesia.embassy.gov.au/>, diakses pada 13 Juni 2016 pukul 23.30 wib.

<sup>52</sup> PM Australia Beri Beasiswa Ilmuwan RI, *Kedaulatan Rakyat*, 11 November 2010.

<sup>53</sup> Pernyataan Bersama Indonesia-Australia dalam arsip <http://indonesia.embassy.gov.au/>, diakses pada 13 Juni 2016 pukul 23.30 wib.

<sup>54</sup> Djibril Muhammad, 2010, *Komandan Socom Australia Terkesima dengan kemampuan Kopassus*, <http://nasional.republika.co.id/>, diakses pada 13 Juni 2016 pukul 20.45 wib.

<sup>55</sup> *Ibid.*

baik Socom maupun kopassus dalam menangani aksi terorisme yang sewaktu-waktu mengancam keamanan negara.

Kerjasama kedua negara di bidang pertahanan tidak hanya terjalin ketika menjalani simulasi penanggulangan aksi teroro saja, akan tetapi sudah terjalin sejak lama. Pada tahun 2006 ketika masih dipimpin John Howard kedua negara telah membuat kesepakatan yaitu Lombok Treaty yang berisi komitmen untuk saling berkonsultasi dalam bidang pertahanan, kontra terorisme, serta berbagai informasi tentang keamanan.<sup>56</sup> Mengingat letak wilayah Australia dan Indonesia yang memang saling berdekatan sehingga perlu adanya kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan yang mendukung satu sama lain demi keamanan bersama.

### III. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut.

Kevin Rudd merupakan Perdana Menteri Australia ke-26 menggantikan pendahulunya, John Howard dari Partai Liberal. Rudd berhasil mematahkan dominasi Partai Liberal dalam kepemimpinan di parlemen Australia. Beberapa kebijakan yang diterapkan membawanya menjadi Perdana Menteri Australia yang sangat populer ketika itu, yaitu (1) meminta maaf kepada suku Aborigin pada 13 Februari 2008, meratifikasi Protokol Kyoto sebagai aksi nyata untuk menyelamatkan bumi akibat efek gas rumah kaca, (2) langkah Rudd dalam meratifikasi Protokol Kyoto menjadi keputusan yang baik dan menaikkan citranya sebagai perdana menteri, (3) menarik pasukan Australia dari Irak yang dikirim ketika masa Howard.

Karir politik Kevin Rudd yang meski telah menorehkan kebijakan yang bagus bagi Australia nyatanya tidak selalu berjalan mulus. Popularitasnya mulai menurun ketika Rudd menaikkan pajak pertambangan menjadi 40 persen. Julia Gillard dan para petinggi dari Partai Buruh yang khawatir akan eksistensi partai dalam parlemen kemudian berhasil melengserkan Rudd dari pimpinan partai sekaligus perdana menteri dan digantikan oleh Julia Gillard.

Julia Eileen Gillard lahir di Barry, Inggris pada 29 September 1961. Ayah ibunya adalah John dan Moira Gillard, keduanya pindah ke Australia karena Gillard kecil menderita peradangan dinding paru-paru. Mengawali karir sebagai wakil dari wilayah Lator, Victoria pada pemilu 1998. Karir politiknya terus meningkat sampai akhirnya menjadi Deputi Kevin Rudd pada 2007-2010 dan menjadi Perdana Menteri pada 2010-2013. Berbagai kebijakan telah diterapkan ketika Gillard menjabat sebagai Perdana Menteri Australia.

Selama menjabat sebagai Perdana Menteri Australia, Julia Gillard telah menerapkan berbagai kebijakan yaitu (1) pajak pertambangan yang diubah menjadi 30 persen, (2) pajak emisi karbon bagi pelaku industry, (3) pajak baru, pajak bagi yang tidak terkena banjir, (4) kebijakan terhadap para pencari suaka yang menyiratkan bahwa Julia Gillard menolak kehadiran mereka, (5) undang-undang kemasan polos sebagai usaha untuk mengurangi peredaran rokok dan tembakau di Australia (6) kebijakan terhadap Indonesia sebagai salah satu tetangga terdekat.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Daniel Murdiyaso. (2007). *Protokol Kyoto Implikasinya bagi Negara Berkembang*. Jakarta: Kompas.
- [2]. Ritzer, George & Goodman, Douglas J. "Sociological Theory". a.b Nurhadi. (2008). *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

---

<sup>56</sup> Catherine McGrath, 2013, *Eratnya Kerjasama Indonesia-Australia*, <http://www.radioaustralia.net.au/>, diakses pada 13 Juni 2016 pukul 24.00 wib.

- [3]. Helius Sjamsuddin. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- [4]. Julius Siboro. (1989). *Sejarah Australia*. Jakarta: IKIP Bandung.
- [5]. Jurusan Pendidikan Sejarah. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- [6]. Kuntowijoyo. (2007). *Pengantar Ilmu Sejarah Cetakan Kelima*. Yogyakarta: Ombak.
- [7]. Richard Chauvel, “ \_\_\_\_\_”, a.b Sujinah dan Ismu. (1992). *Budaya dan Politik Australia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- [8]. Sardiman A.M. (2004). *Mengenal Sejarah*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- [9]. Sri Yulianti. (2012). “Politik Australia dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) pada Pemerintahan Julia Gillard (2010-2013)”. *JOM FISIP* Volume 1, No. 2, hlm. 1-11.

#### **Surat Kabar**

- [10]. Australia Mulai Tarik Ratusan Tentara, *Kompas*, 2 Juni 2008.
- [11]. Australia Usulkan Pajak Baru, Warga Yang Tak Terkena Banjir Dikenai Pajak Pemulihan, *Kompas*, 28 Januari 2011.
- [12]. Banjir Australia, Bencana Terparah, Kini Sebanyak 46 Kota di Victoria Terendam, *Kompas*, 18 Januari 2011.
- [13]. Julia Gillard dan Kekejaman Politik, *Kompas*, 25 Juni 2010.
- [14]. Julia Gillard Perempuan Serba Pertama, *Kompas*, 25 Juni 2010.
- [15]. Kevin 747 Tetap Populer, *Kompas*, 25 November 2008.
- [16]. Kevin Rudd Ditantang Deputinya, *Kompas*, 24 Juni 2010.
- [17]. Pajak Emisi Karbon Tak Populer, *Kompas*, 3 Juli 2012.
- [18]. Pemilih Australia Menilai Perdana Menteri Tidak Kompeten, *Kompas*, 8 Juni 2010.
- [19]. Perubahan Iklim: Masalah Emisi yang Multidimensi, *Kompas*, 6 Maret 2009.
- [20]. PM Australia Beri Beasiswa Ilmuwan RI, *Kedaulatan Rakyat*, 11 November 2010.
- [21]. PM Gillard dilantik, Kursinya Siap Tertendang, *Kompas*, 16 September 2010.
- [22]. PM: Akhiri Kontroversi, Julia Gillard Gantikan Kevin Rudd, *Kompas*, 25 Juni 2010.
- [23]. Rudd Gulingkan PM Gillard Partai Buruh Pilih Ketua yang Pernah Digulingkan, *Kompas*, 27 Juni 2013.

[24]. Rudd Resmi Minta Maaf Kepada Aborigin, *Kedaulatan Rakyat*, 14 Februari 2008.

[25]. Warga Australia Desak Pemerintah Kurangi Emisi, *Kompas*, 6 Juni 2011.

[26]. Timor Leste Jadi Pusat Suaka, PM Australia Bantah Hidupkan Lagi Solusi Pasifik, *Kompas*, 7 Juli 2010.

**Surat Kabar Online:**

[27]. Catherine McGrath, 2013, *Eratnya Kerjasama Indonesia-Australia*, <http://www.radioaustralia.net.au/>, diakses pada 13 Juni 2016 pukul 24.00 wib.

[28]. Djibril Muhammad, 2010, *Komandan Socom Australia Terkesima dengan kemampuan Kopassus*, <http://nasional.republika.co.id/>, diakses pada 13 Juni 2016 pukul 20.45 wib.

[29]. Ita Lismawati F. Malau, 2010, *Si Pekerja Keras dari Negeri Kangguru*, <http://m.news.viva.co.id/news/read/159966-si-pekerja-keras-dari-negeri-kangguru/0> diakses pada 19 Maret 2016 pukul 15.08 wib.

[30]. Ita, 2010, *Jadi PM Wanita Pertama Australia, Julia Gillard Dulunya Ingin Jadi Guru*, <http://news.detik.com/berita/1385417/jadi-pm-wanita-pertama-australia-julia-gillard-dulunya-ingin-jadi-guru> diakses pada 19 Maret 2016 pukul 15.15 wib.

[31]. Julia Gillard merupakan alumnus SMA Unley, dan pada Desember 2006 berkesempatan mengunjungi sekolah tersebut, tersaji dalam \_\_, 2006, <http://www.abc.net.au/news/2006-12-14/gillard-addresses-students-at-former-high-school/2153776>, diakses pada 4 April 2016 pukul 20.12 wib.

[32]. Mjeducation, 2010, *Julia Gillard, Kisah Sukses Seorang Imigran*, <http://mje.co.id/julia-gillard-kisah-sukses-seorang-migran/> diakses pada 19 Maret 2016 pukul 14.00 wib.

[33]. Pernyataan Bersama Indonesia-Australia dalam arsip <http://indonesia.embassy.gov.au/>, diakses pada 13 Juni 2016 pukul 23.30 wib.

[34]. Tersaji dalam arsip National Archives of Australia <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/rudd/fast-facts.aspx> diakses pada 17 Februari 2016 pukul 13.45 WIB.

[35]. Tersaji dalam arsip National Archives of Australia <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/gillard/fast-facts.aspx> diakses pada 17 Februari 2016 pukul 13.40 WIB.

[36]. Tersaji dalam arsip National Archives of Australia <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/Gillard/spouse.aspx> diakses pada 17 Februari 2016 pukul 13.48 WIB.

[37]. Tersaji dalam arsip National Archives of Australia, <http://primeministers.naa.gov.au/primeministers/Gillard/in-office.aspx>, diakses pada 17 Februari 2016.

*Reviewer*



Dr. Aman, M.Pd  
NIP.197410152003121001

Yogyakarta, 20 Juni 2016  
Menyetujui,  
Pembimbing



Rr. Terry Irenewaty, M. Hum.  
NIP. 195604281982032003